



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, menetapkan Kementerian/Lembaga untuk menyusun suatu pedoman harga satuan pekerjaan sebagai dasar untuk menghitung harga satuan yang selanjutnya menghasilkan Harga Satuan Keluaran;

- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman Harga Satuan Biaya Keluaran Kegiatan yang menghasilkan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks dalam rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBPN Pada Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 373);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 694).
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

3. Indeks Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan satu volume keluaran *output* yang ditetapkan oleh Menteri di luar Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
4. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran untuk menghasilkan total volume keluaran *output*.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
6. Keluaran (*Output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program.
7. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) dari Kegiatan dalam satu program.
8. Kinerja adalah Prestasi Kerja berupa Keluaran (*Output*) dari suatu Kegiatan atau Hasil (*Outcome*) dari suatu Program dengan Kuantitas dan Kualitas terukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan Satuan Biaya Keluaran Kegiatan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian dalam penyusunan RKA-K/L;
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan dokumen RKA-K/L yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

BAB III
SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Satuan Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian terdiri dari Indeks Biaya Keluaran Kegiatan dan Total Biaya Keluaran Kegiatan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk komponen Keluaran yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. dititikberatkan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing Keluaran.
- (2) Indeks Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Perhitungan Rumus maka perhitungannya dilakukan sesuai dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan/atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Total Biaya Keluaran Kegiatan di lingkungan Kementerian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RKA-K/L di lingkungan Kementerian, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Tahun 2018;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju; dan
- c. bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Kementerian Tahun 2019.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan berfungsi sebagai batas tertinggi;
- (2) Batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian bertanggung jawab atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dalam pelaksanaan penyusunan RKA-K/L Kementerian Tahun 2018 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Indeks Biaya Keluaran dan Total Biaya Keluaran Kegiatan Tahun 2018 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 111

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 20 TAHUN 2017
 TENTANG
 SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
 TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 TAHUN 2018

INDEKS BIAYA KELUARAN KEGIATAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL

| No | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/Kategori | Volume | Indeks Biaya |
|----|--|--|----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pelayanan Titik Informasi Koordinat | | 1 Titik | 40.000 |
| 2 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori I | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara | 1 Bidang | 156.000 |
| 3 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori II | Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung | 1 Bidang | 130.500 |
| 4 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori III | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo | 1 Bidang | 106.000 |
| 5 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori IV | Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung | 1 Bidang | 79.000 |
| 6 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori V | Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali | 1 Bidang | 53.000 |
| 7 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori VI | Wilayah Kepulauan | 1 Bidang | 268.000 |
| 8 | Informasi Bidang Tanah Prona Sistematis Lengkap Kategori VII | Daerah Terpencil | 1 Bidang | 482.300 |
| 9 | Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kantah) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 10 | Pengukuran Massal (Kantah) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 11 | Pengembalian Batas (Kantah) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 12 | Pengukuran Batas Bidang Tanah (Kanwil) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 13 | Pengukuran Massal (Kanwil) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 14 | Pengembalian Batas (Kanwil) | | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |

| No | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/Kategori | Volume | Indeks Biaya |
|----|--|--|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) | Informasi Kutipan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko) | 1 Dokumen | 11.600 |
| 16 | Layanan Informasi Kutipan <i>Copy</i> Warkah | Informasi Kutipan <i>Copy</i> Warkah | 1 Dokumen | 62.600 |
| 17 | Layanan Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun | Informasi Kutipan Denah Satuan Rumah Susun | 1 Dokumen | 15.200 |
| 18 | Layanan Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) | Informasi Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya) | 1 Dokumen | 19.600 |
| 19 | Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah | Tanah Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 20 | Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah | Tanah Non Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 21 | Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal | Tanah Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 22 | Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Tim Peneliti Tanah Massal | Tanah Non Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 23 | Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi | Tanah Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 24 | Pengolahan Data Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstataasi | Tanah Non Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 25 | Panitia P3MB | Bidang | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 26 | Panitia Pemeriksaan Tanah B | Bidang | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 27 | Informasi Pengecekan Sertipikat | Bidang | 1 Bidang | 9.500 |
| 28 | Informasi Data Pendaftaran Tanah Melalui SKPT | Bidang | 1 Bidang | 11.000 |
| 29 | Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Sertipikat Swadaya) | Bidang | 1 Bidang | 10.000 |
| 30 | Pemeliharaan data Pertanahan | Bidang | 1 Bidang | 16.000 |
| 31 | Pemeliharaan data Pertanahan (Pemecahan dan Pemisahan) | Bidang | 1 Bidang | 16.000 |
| 32 | Sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat | Bidang | 1 Bidang | 72.000 |
| 33 | Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakanwil | untuk cuti antara 3 sampai dengan 6 bulan | 1 SK | 41.000 |
| 34 | Pemberian Surat Keputusan cuti PPAT oleh Kakantah | untuk cuti sampai dengan 3 bulan | 1 SK | 10.000 |
| 35 | Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang | Sumpah Jabatan sebagai PPAT/paket/5 orang | 1 SK | 1.985.000 |
| 36 | Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang | Sumpah Jabatan sebagai PPAT Sementara/paket/10 orang | 1 SK | 2.135.000 |
| 37 | Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang | Penunjukan sebagai PPAT Sementara/orang | 1 SK | 70.000 |
| 38 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A0 | 1 Layanan | 90.000 |
| 39 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A1 | 1 Layanan | 67.500 |
| 40 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A2 | 1 Layanan | 52.000 |
| 41 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A3 | 1 Layanan | 38.500 |

| No | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/Kategori | Volume | Indeks Biaya |
|-----------|---|--|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Berwarna Format A4 | 1 Layanan | 30.500 |
| 43 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A0 | 1 Layanan | 65.000 |
| 44 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A1 | 1 Layanan | 45.000 |
| 45 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A2 | 1 Layanan | 32.000 |
| 46 | Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 | Peta Analisis Penatagunaan Tanah Hitam Putih Format A3 | 1 Layanan | 19.750 |
| 47 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | JAWA TENGAH | 1 SP | 87.626.000 |
| 48 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | JAWA TIMUR | 1 SP | 92.514.000 |
| 49 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | ACEH | 1 SP | 93.351.000 |
| 50 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SUMATERA UTARA | 1 SP | 98.694.000 |
| 51 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | RIAU | 1 SP | 91.115.000 |
| 52 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KALIMANTAN BARAT | 1 SP | 91.158.000 |
| 53 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KALIMANTAN SELATAN | 1 SP | 97.610.000 |
| 54 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KALIMANTAN TIMUR | 1 SP | 95.923.000 |
| 55 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI UTARA | 1 SP | 102.146.000 |
| 56 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI TENGAH | 1 SP | 100.782.000 |
| 57 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI SELATAN | 1 SP | 105.952.000 |
| 58 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI TENGGARA | 1 SP | 102.868.000 |
| 59 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | MALUKU | 1 SP | 112.662.000 |
| 60 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | NUSA TENGGARA BARAT | 1 SP | 105.368.000 |
| 61 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 SP | 108.200.000 |
| 62 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | PAPUA | 1 SP | 125.972.000 |
| 63 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | BENGKULU | 1 SP | 97.374.000 |
| 64 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | GORONTALO | 1 SP | 90.978.000 |
| 65 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | MALUKU UTARA | 1 SP | 109.634.000 |
| 66 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KEPULAUAN RIAU | 1 SP | 103.158.000 |
| 67 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | PAPUA BARAT | 1 SP | 132.450.000 |
| 68 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | DKI JAKARTA | 1 SP | 113.204.000 |
| 69 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | JAWA TIMUR | 1 SP | 128.720.000 |

| No | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/Kategori | Volume | Indeks Biaya |
|-----------|--|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | ACEH | 1 SP | 117.410.000 |
| 71 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SUMATERA BARAT | 1 SP | 97.664.000 |
| 72 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KALIMANTAN BARAT | 1 SP | 119.864.000 |
| 73 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI UTARA | 1 SP | 120.868.000 |
| 74 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI TENGAH | 1 SP | 120.999.000 |
| 75 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI SELATAN | 1 SP | 120.996.000 |
| 76 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI TENGGARA | 1 SP | 120.658.000 |
| 77 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | MALUKU | 1 SP | 140.298.000 |
| 78 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | BALI | 1 SP | 152.024.000 |
| 79 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | NUSA TENGGARA BARAT | 1 SP | 120.808.000 |
| 80 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | PAPUA | 1 SP | 161.902.000 |
| 81 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | BANTEN | 1 SP | 111.718.000 |
| 82 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | BANGKA BELITUNG | 1 SP | 117.684.000 |
| 83 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | SULAWESI BARAT | 1 SP | 113.140.000 |
| 84 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | KEPULAUAN RIAU | 1 SP | 121.314.000 |
| 85 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Pesisir</i> | PAPUA BARAT | 1 SP | 158.912.000 |
| 86 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i> | JAWA BARAT | 1 SP | 97.892.000 |
| 87 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i> | D.I. YOGYAKARTA | 1 SP | 116.190.000 |
| 88 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i> | JAMBI | 1 SP | 92.630.000 |
| 89 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Inventarisasi Wilayah Tertentu</i> | KALIMANTAN TENGAH | 1 SP | 104.590.000 |
| 90 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | JAWA BARAT | 1 SP | 101.548.000 |
| 91 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | JAWA TIMUR | 1 SP | 112.096.000 |
| 92 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | RIAU | 1 SP | 88.300.000 |
| 93 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | LAMPUNG | 1 SP | 83.286.000 |
| 94 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | KALIMANTAN SELATAN | 1 SP | 95.062.000 |
| 95 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | KALIMANTAN TIMUR | 1 SP | 109.322.000 |
| 96 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | SULAWESI UTARA | 1 SP | 99.308.000 |
| 97 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | BALI | 1 SP | 125.508.000 |
| 98 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | PAPUA | 1 SP | 129.794.000 |
| 99 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Potensi Penataan Kawasan P3WT</i> | SULAWESI BARAT | 1 SP | 93.666.000 |

| No | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/Kategori | Volume | Indeks Biaya |
|-----------|--|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 100 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | JAWA BARAT | 1 SP | 64.487.000 |
| 101 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | D.I. YOGYAKARTA | 1 SP | 75.208.000 |
| 102 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | JAMBI | 1 SP | 65.855.000 |
| 103 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | SUMATERA SELATAN | 1 SP | 81.987.000 |
| 104 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | LAMPUNG | 1 SP | 64.861.000 |
| 105 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | KALIMANTAN TENGAH | 1 SP | 74.651.000 |
| 106 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | KALIMANTAN SELATAN | 1 SP | 73.197.000 |
| 107 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | KALIMANTAN TIMUR | 1 SP | 79.745.000 |
| 108 | <i>Output Data WP3WT; Suboutput: Data Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan P3WT</i> | BALI | 1 SP | 90.399.000 |
| 109 | Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) | Tanah Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |
| 110 | Sertipikat Konsolidasi Tanah (Swadaya) | Tanah Non Pertanian | 1 Bidang | Perhitungan Rumus |

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

SOFYAN A DJALIL

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2018

TOTAL BIAYA KELUARAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Aceh | 100.000 | Hektar | 200.161.000 |
| 2 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Jawa Barat | 68.000 | Hektar | 132.844.000 |
| 3 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sumatera Barat | 19.000 | Hektar | 65.385.000 |
| 4 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Jawa Tengah | 45.000 | Hektar | 90.002.000 |
| 5 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Riau | 42.000 | Hektar | 94.589.000 |
| 6 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Jambi | 79.000 | Hektar | 141.726.000 |
| 7 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Jawa Timur | 86.000 | Hektar | 166.087.000 |
| 8 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sumatera Selatan | 53.000 | Hektar | 125.014.000 |
| 9 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Kalimantan Selatan | 112.000 | Hektar | 201.386.000 |
| 10 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sulawesi Tenggara | 58.000 | Hektar | 123.723.000 |
| 11 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Maluku | 64.000 | Hektar | 145.577.000 |
| 12 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Nusa Tenggara Barat | 30.000 | Hektar | 81.482.000 |
| 13 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Banten | 18.000 | Hektar | 61.487.000 |
| 14 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Papua | 42.000 | Hektar | 119.761.000 |
| 15 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Kalimantan Barat | 81.000 | Hektar | 145.557.000 |
| 16 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Gorontalo | 34.000 | Hektar | 85.708.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 17 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Bangka Belitung | 20.000 | Hektar | 59.982.000 |
| 18 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Maluku Utara | 60.000 | Hektar | 125.063.000 |
| 19 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Kalimantan Timur | 59.000 | Hektar | 145.277.000 |
| 20 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sulawesi Barat | 50.000 | Hektar | 98.261.000 |
| 21 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Papua Barat | 35.000 | Hektar | 106.558.000 |
| 22 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sulawesi Selatan | 97.000 | Hektar | 189.214.000 |
| 23 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Bengkulu | 43.000 | Hektar | 99.210.000 |
| 24 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Kalimantan Tengah | 61.000 | Hektar | 134.671.000 |
| 25 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Lampung | 76.000 | Hektar | 125.105.000 |
| 26 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sulawesi Tengah | 75.000 | Hektar | 150.149.000 |
| 27 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sulawesi Utara | 108.000 | Hektar | 186.480.000 |
| 28 | Pembuatan Peta Dasar Skala 1 : 2500 | Sumatera Utara | 52.000 | Hektar | 107.079.000 |
| 29 | Peta Tematik | DKI Jakarta | 20.000 | Hektar | 64.621.000 |
| 30 | Peta Tematik | Jawa Barat | 30.000 | Hektar | 132.549.600 |
| 31 | Peta Tematik | Jawa Tengah | 20.000 | Hektar | 91.506.000 |
| 32 | Peta Tematik | D.I. Yogyakarta | 10.000 | Hektar | 61.792.000 |
| 33 | Peta Tematik | Jawa Timur | 15.000 | Hektar | 82.420.050 |
| 34 | Peta Tematik | Aceh | 15.000 | Hektar | 79.434.000 |
| 35 | Peta Tematik | Sumatera Utara | 30.000 | Hektar | 125.471.100 |
| 36 | Peta Tematik | Sumatera Barat | 15.000 | Hektar | 79.305.000 |
| 37 | Peta Tematik | Riau | 15.000 | Hektar | 77.595.000 |
| 38 | Peta Tematik | Jambi | 25.000 | Hektar | 108.320.500 |
| 39 | Peta Tematik | Sumatera Selatan | 40.000 | Hektar | 169.332.400 |
| 40 | Peta Tematik | Lampung | 30.000 | Hektar | 119.525.100 |
| 41 | Peta Tematik | Kalimantan Barat | 40.000 | Hektar | 162.201.200 |
| 42 | Peta Tematik | Kalimantan Tengah | 20.000 | Hektar | 100.328.600 |
| 43 | Peta Tematik | Kalimantan Selatan | 30.000 | Hektar | 126.450.000 |
| 44 | Peta Tematik | Kalimantan Timur | 30.000 | Hektar | 160.058.100 |
| 45 | Peta Tematik | Sulawesi Utara | 10.000 | Hektar | 64.277.500 |
| 46 | Peta Tematik | Sulawesi Tengah | 15.000 | Hektar | 83.554.500 |
| 47 | Peta Tematik | Sulawesi Selatan | 10.000 | Hektar | 67.507.500 |
| 48 | Peta Tematik | Sulawesi Tenggara | 25.000 | Hektar | 114.749.500 |
| 49 | Peta Tematik | Maluku | 25.000 | Hektar | 133.907.000 |
| 50 | Peta Tematik | Bali | 30.000 | Hektar | 154.904.100 |
| 51 | Peta Tematik | Nusa Tenggara Barat | 40.000 | Hektar | 167.283.200 |
| 52 | Peta Tematik | Nusa Tenggara Timur | 40.000 | Hektar | 165.517.200 |
| 53 | Peta Tematik | Papua | 40.000 | Hektar | 233.052.000 |
| 54 | Peta Tematik | Bengkulu | 10.000 | Hektar | 64.968.500 |
| 55 | Peta Tematik | Banten | 25.000 | Hektar | 117.447.000 |
| 56 | Peta Tematik | Gorontalo | 15.000 | Hektar | 80.631.450 |
| 57 | Peta Tematik | Bangka Belitung | 15.000 | Hektar | 78.055.500 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 58 | Peta Tematik | Maluku Utara | 20.000 | Hektar | 112.497.000 |
| 59 | Peta Tematik | Sulawesi Barat | 30.000 | Hektar | 124.290.600 |
| 60 | Peta Tematik | Kepulauan Riau | 20.000 | Hektar | 97.644.000 |
| 61 | Peta Tematik | Papua Barat | 20.000 | Hektar | 131.099.000 |
| 62 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | DKI Jakarta | 1 | Kanwil | 71.228.600 |
| 63 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Jawa Barat | 1 | Kanwil | 226.430.000 |
| 64 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Jawa Tengah | 1 | Kanwil | 225.580.000 |
| 65 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | D.I. Yogyakarta | 1 | Kanwil | 116.425.000 |
| 66 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Jawa Timur | 1 | Kanwil | 122.820.000 |
| 67 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Aceh | 1 | Kanwil | 91.745.000 |
| 68 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sumatera Utara | 1 | Kanwil | 147.460.000 |
| 69 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sumatera Barat | 1 | Kanwil | 101.670.000 |
| 70 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Riau | 1 | Kanwil | 87.902.000 |
| 71 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Jambi | 1 | Kanwil | 196.622.000 |
| 72 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sumatera Selatan | 1 | Kanwil | 142.100.000 |
| 73 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Lampung | 1 | Kanwil | 135.870.000 |
| 74 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Kalimantan Barat | 1 | Kanwil | 161.490.000 |
| 75 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Kalimantan Tengah | 1 | Kanwil | 185.954.000 |
| 76 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Kalimantan Selatan | 1 | Kanwil | 138.040.000 |
| 77 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Kalimantan Timur | 1 | Kanwil | 272.043.000 |
| 78 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sulawesi Utara | 1 | Kanwil | 167.523.000 |
| 79 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sulawesi Tengah | 1 | Kanwil | 190.604.000 |
| 80 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sulawesi Selatan | 1 | Kanwil | 239.300.000 |
| 81 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sulawesi Tenggara | 1 | Kanwil | 197.670.000 |
| 82 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Maluku | 1 | Kanwil | 129.915.000 |
| 83 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Bali | 1 | Kanwil | 183.734.200 |
| 84 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Nusa Tenggara Barat | 1 | Kanwil | 153.830.000 |
| 85 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Nusa Tenggara Timur | 1 | Kanwil | 140.498.000 |
| 86 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Papua | 1 | Kanwil | 147.358.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|---|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 87 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Bengkulu | 1 | Kanwil | 106.818.000 |
| 88 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Banten | 1 | Kanwil | 100.776.000 |
| 89 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Gorontalo | 1 | Kanwil | 197.008.000 |
| 90 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Bangka Belitung | 1 | Kanwil | 110.790.000 |
| 91 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Maluku Utara | 1 | Kanwil | 211.140.000 |
| 92 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Kepulauan Riau | 1 | Kanwil | 64.500.000 |
| 93 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Sulawesi Barat | 1 | Kanwil | 111.822.000 |
| 94 | <i>Database</i> Pemberdayaan Masyarakat (Kanwil) | Papua Barat | 1 | Kanwil | 169.445.000 |
| 95 | Kegiatan Usaha Bersama | Kategori I (Wilayah I: Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat) | 1 | Satker | 187.042.800 |
| 96 | Kegiatan Usaha Bersama | Kategori II (Wilayah II: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau) | 1 | Satker | 161.594.800 |
| 97 | Kegiatan Usaha Bersama | Kategori III (Wilayah III: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat) | 1 | Satker | 140.357.800 |
| 98 | Kegiatan Usaha Bersama | Kategori IV (Wilayah IV: Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Gorontalo) | 1 | Satker | 116.177.800 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|---|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 99 | Kegiatan Usaha Bersama | Kategori V (Wilayah V: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Banten) | 1 | Satker | 94.367.800 |
| 100 | Layanan Pengaduan (Kantah) | Kantor Pertanahan | 1 | Kasus | 2.558.000 |
| 101 | Analisa Sengketa/Konflik (Kantah) | Kantor Pertanahan | 1 | Kasus | 10.800.000 |
| 102 | Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus (Kantah) | Kantor Pertanahan | 1 | Kasus | 2.800.000 |
| 103 | Layanan Pengaduan (Kanwil) | Kantor Wilayah | 1 | Kasus | 2.558.000 |
| 104 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara | 1 | Kasus | 57.794.000 |
| 105 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) | Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kep. Riau, Bangka Belitung | 1 | Kasus | 40.734.000 |
| 106 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo | 1 | Kasus | 60.398.000 |
| 107 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) | Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung | 1 | Kasus | 36.514.000 |
| 108 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) | D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali | 1 | Kasus | 36.034.000 |
| 109 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil) | DKI Jakarta | 1 | Kasus | 14.070.000 |
| 110 | Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) | Jawa Barat dan Banten | 1 | Kasus | 30.874.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|--|---------------|-------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 111 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori I (Kanwil) | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara | 1 | Kasus | 166.834.000 |
| 112 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori II (Kanwil) | Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung | 1 | Kasus | 144.714.000 |
| 113 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori III (Kanwil) | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo | 1 | Kasus | 178.522.000 |
| 114 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori IV (Kanwil) | Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung | 1 | Kasus | 140.174.000 |
| 115 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori V (Kanwil) | D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali | 1 | Kasus | 148.734.000 |
| 116 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VI (Kanwil) | DKI Jakarta | 1 | Kasus | 76.660.000 |
| 117 | Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Kategori VII (Kanwil) | Jawa Barat dan Banten | 1 | Kasus | 143.644.000 |
| 118 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kantah) | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara | 1 | Kasus | 65.935.000 |
| 119 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kantah) | Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung | 1 | Kasus | 48.735.000 |
| 120 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kantah) | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo | 1 | Kasus | 57.055.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|--|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 121 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kantah) | Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung | 1 | Kasus | 48.895.000 |
| 122 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kantah) | D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali | 1 | Kasus | 47.935.000 |
| 123 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kantah) | DKI Jakarta | 1 | Kasus | 18.345.000 |
| 124 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kantah) | Jawa Barat dan Banten | 1 | Kasus | 50.015.000 |
| 125 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori I (Kanwil) | Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara | 1 | Kasus | 78.578.000 |
| 126 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori II (Kanwil) | Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung | 1 | Kasus | 58.598.000 |
| 127 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori III (Kanwil) | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo | 1 | Kasus | 66.675.000 |
| 128 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori IV (Kanwil) | Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung | 1 | Kasus | 56.229.000 |
| 129 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori V (Kanwil) | D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali | 1 | Kasus | 55.209.000 |
| 130 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VI (Kanwil) | DKI Jakarta | 1 | Kasus | 20.997.000 |
| 131 | Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Kategori VII (Kanwil) | Jawa Barat dan Banten | 1 | Kasus | 53.755.000 |
| 132 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Aceh | Aceh | 950 | Hektar | 98.498.850 |
| 133 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Bengkulu | Bengkulu | 2.850 | Hektar | 84.425.000 |
| 134 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 600 | Hektar | 24.640.200 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 135 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | 1.000 | Hektar | 28.095.000 |
| 136 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 5.900 | Hektar | 301.242.200 |
| 137 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 200 | Hektar | 19.753.800 |
| 138 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 510 | Hektar | 22.897.150 |
| 139 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 1.056 | Hektar | 93.454.944 |
| 140 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 950 | Hektar | 96.290.100 |
| 141 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 300 | Hektar | 55.254.900 |
| 142 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Riau | Riau | 197 | Hektar | 29.277.333 |
| 143 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 1.016 | Hektar | 62.845.000 |
| 144 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 3.453 | Hektar | 240.380.000 |
| 145 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 950 | Hektar | 41.278.450 |
| 146 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 370 | Hektar | 55.804.880 |
| 147 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 1.007 | Hektar | 94.934.925 |
| 148 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 901 | Hektar | 69.699.400 |
| 149 | Sertipikat Hak Pengelolaan Provinsi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 1.030 | Hektar | 27.275.000 |
| 150 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Aceh | Aceh | 1 | Satker | 133.152.000 |
| 151 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung | Bangka Belitung | 1 | Satker | 123.440.000 |
| 152 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bali | Bali | 1 | Satker | 178.935.000 |
| 153 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Banten | Banten | 1 | Satker | 142.886.000 |
| 154 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Bengkulu | Bengkulu | 1 | Satker | 138.088.000 |
| 155 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi D.I. Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | 1 | Satker | 128.141.000 |
| 156 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 1 | Satker | 151.118.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 157 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat | 1 | Satker | 139.985.000 |
| 158 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jambi | Jambi | 1 | Satker | 120.410.000 |
| 159 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | 1 | Satker | 116.650.000 |
| 160 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | 1 | Satker | 122.681.000 |
| 161 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 1 | Satker | 133.576.000 |
| 162 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | 1 | Satker | 144.560.000 |
| 163 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 1 | Satker | 127.738.000 |
| 164 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 1 | Satker | 167.291.000 |
| 165 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Kepulauan Riau | Kep. Riau | 1 | Satker | 125.866.000 |
| 166 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Lampung | Lampung | 1 | Satker | 127.406.000 |
| 167 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 1 | Satker | 144.080.000 |
| 168 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Maluku | Maluku | 1 | Satker | 155.184.000 |
| 169 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 1 | Satker | 143.215.000 |
| 170 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 1 | Satker | 136.245.000 |
| 171 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua Barat | Papua Barat | 1 | Satker | 187.765.000 |
| 172 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Papua | Papua | 1 | Satker | 217.550.000 |
| 173 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Riau | Riau | 1 | Satker | 114.350.000 |
| 174 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 1 | Satker | 109.484.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 175 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 1 | Satker | 156.145.000 |
| 176 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 1 | Satker | 125.342.000 |
| 177 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 1 | Satker | 123.416.000 |
| 178 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 1 | Satker | 136.450.000 |
| 179 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 | Satker | 113.540.000 |
| 180 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 1 | Satker | 127.890.000 |
| 181 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi Sumatera Utara | Sumatera Utara | 1 | Satker | 121.250.000 |
| 182 | Inventarisasi dan Pemetaan Pengadaan Tanah di Provinsi DKI Jakarta | DKI Jakarta | 1 | Satker | 119.770.000 |
| 183 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Aceh Utara Provinsi Aceh | Aceh | 80.000 | Hektar | 359.040.000 |
| 184 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bangka Selatan Provinsi Sumatera Utara | Sumatera Utara | 80.000 | Hektar | 355.200.000 |
| 185 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu | Bengkulu | 69.000 | Hektar | 319.884.000 |
| 186 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 89.000 | Hektar | 386.616.000 |
| 187 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kerinci Provinsi Jambi | Jambi | 100.000 | Hektar | 432.300.000 |
| 188 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 80.000 | Hektar | 367.040.000 |
| 189 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | 70.000 | Hektar | 322.840.000 |
| 190 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 80.000 | Hektar | 399.840.000 |
| 191 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kapuas Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 50.000 | Hektar | 292.500.000 |
| 192 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Tulang Bawang Provinsi Lampung | Lampung | 100.000 | Hektar | 411.400.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 193 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Seram Bagian Timur Provinsi Maluku | Maluku | 10.000 | Hektar | 98.720.000 |
| 194 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 10.000 | Hektar | 95.490.000 |
| 195 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 94.000 | Hektar | 469.812.000 |
| 196 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 105.000 | Hektar | 498.120.000 |
| 197 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat | Papua Barat | 6.000 | Hektar | 101.946.000 |
| 198 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jaya Wijaya Provinsi Papua | Papua | 15.000 | Hektar | 152.490.000 |
| 199 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Siak Provinsi Riau | Riau | 80.000 | Hektar | 342.640.000 |
| 200 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 54.000 | Hektar | 274.482.000 |
| 201 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 64.000 | Hektar | 311.616.000 |
| 202 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 40.000 | Hektar | 216.640.000 |
| 203 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 30.000 | Hektar | 168.390.000 |
| 204 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 80.000 | Hektar | 358.800.000 |
| 205 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 70.000 | Hektar | 351.960.000 |
| 206 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Kepulauan Riau | Kep. Riau | 64.000 | Hektar | 305.372.000 |
| 207 | Peta Zona Nilai Tanah Skala 1 : 10000 Kab Labuhan Batu Provinsi Bangka Belitung | Bangka Belitung | 15.000 | Hektar | 89.700.000 |
| 208 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Aceh | Aceh | 800 | Bidang | 319.720.000 |
| 209 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bali | Bali | 900 | Bidang | 460.305.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 210 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bangka Belitung | Bangka Belitung | 700 | Bidang | 266.245.000 |
| 211 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Banten | Banten | 800 | Bidang | 339.560.000 |
| 212 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Bengkulu | Bengkulu | 800 | Bidang | 322.824.000 |
| 213 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 500 | Bidang | 201.675.000 |
| 214 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat | 2.600 | Bidang | 1.095.510.000 |
| 215 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jambi | Jambi | 900 | Bidang | 347.895.000 |
| 216 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | 3.500 | Bidang | 1.308.475.000 |
| 217 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | 3.800 | Bidang | 1.571.490.000 |
| 218 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 600 | Bidang | 247.110.000 |
| 219 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | 800 | Bidang | 317.800.000 |
| 220 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 300 | Bidang | 127.845.000 |
| 221 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 1.000 | Bidang | 528.850.000 |
| 222 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau | Kep. Riau | 500 | Bidang | 202.875.000 |
| 223 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Lampung | Lampung | 700 | Bidang | 257.467.000 |
| 224 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 600 | Bidang | 277.950.000 |
| 225 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Maluku | Maluku | 400 | Bidang | 191.860.000 |
| 226 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 900 | Bidang | 384.165.000 |
| 227 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 400 | Bidang | 168.700.000 |
| 228 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua Barat | Papua Barat | 400 | Bidang | 236.900.000 |
| 229 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Papua | Papua | 400 | Bidang | 249.700.000 |
| 230 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Riau | Riau | 500 | Bidang | 190.525.000 |
| 231 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 500 | Bidang | 192.695.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|--|---------------|--------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 232 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 1.700 | Bidang | 732.275.000 |
| 233 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 800 | Bidang | 340.296.000 |
| 234 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 600 | Bidang | 245.610.000 |
| 235 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 700 | Bidang | 276.535.000 |
| 236 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1.400 | Bidang | 546.350.000 |
| 237 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 1.100 | Bidang | 473.825.000 |
| 238 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi Sumatera Utara | Sumatera Utara | 1.900 | Bidang | 749.075.000 |
| 239 | Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | 500 | Bidang | 229.575.000 |
| 240 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Aceh | Aceh | 1 | Satker | 241.021.000 |
| 241 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bangka Belitung | 1 | Satker | 217.218.000 |
| 242 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Bengkulu | 1 | Satker | 233.623.000 |
| 243 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Gorontalo | 1 | Satker | 269.138.000 |
| 244 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Jambi | 1 | Satker | 209.662.000 |
| 245 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Barat | 1 | Satker | 229.083.000 |
| 246 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kalimantan Tengah | 1 | Satker | 222.734.000 |
| 247 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Kepulauan Riau | 1 | Satker | 217.844.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|--|---------------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 248 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Maluku Utara | 1 | Satker | 266.780.000 |
| 249 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 | Satker | 248.861.000 |
| 250 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua | 1 | Satker | 370.656.000 |
| 251 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Barat | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Papua Barat | 1 | Satker | 346.671.000 |
| 252 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Riau | 1 | Satker | 206.133.000 |
| 253 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Barat | 1 | Satker | 212.397.000 |
| 254 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tengah | 1 | Satker | 232.257.000 |
| 255 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 | Satker | 224.826.000 |
| 256 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sulawesi Utara | 1 | Satker | 250.266.000 |
| 257 | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat | Peningkatan Ketrampilan Penilai Tanah Provinsi Sumatera Barat | 1 | Satker | 205.268.000 |
| 258 | Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 1 | Provinsi | 244.670.000 |
| 259 | Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 1 | Provinsi | 259.850.000 |
| 260 | Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 1 | Provinsi | 214.810.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 261 | Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 1 | Provinsi | 206.025.000 |
| 262 | Sosialisasi Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 1 | Provinsi | 215.390.000 |
| 263 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Aceh | Aceh | 1 | Dokumen | 11.448.000 |
| 264 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bangka Belitung | Bangka Belitung | 1 | Dokumen | 9.770.000 |
| 265 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bali | Bali | 1 | Dokumen | 14.660.000 |
| 266 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Banten | Banten | 1 | Dokumen | 11.564.000 |
| 267 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Bengkulu | Bengkulu | 1 | Dokumen | 11.068.000 |
| 268 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi DKI Jakarta | DKI Jakarta | 1 | Dokumen | 600.000 |
| 269 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Gorontalo | Gorontalo | 1 | Dokumen | 12.322.000 |
| 270 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat | 1 | Dokumen | 11.350.000 |
| 271 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jambi | Jambi | 1 | Dokumen | 10.390.000 |
| 272 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | 1 | Dokumen | 9.720.000 |
| 273 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | 1 | Dokumen | 11.134.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 274 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | 1 | Dokumen | 12.164.000 |
| 275 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | 1 | Dokumen | 10.680.000 |
| 276 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Tengah | Kalimantan Tengah | 1 | Dokumen | 12.742.000 |
| 277 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur | 1 | Dokumen | 20.564.000 |
| 278 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Kepulauan Riau | Kep. Riau | 1 | Dokumen | 10.654.000 |
| 279 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Lampung | Lampung | 1 | Dokumen | 9.416.000 |
| 280 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku | Maluku | 1 | Dokumen | 17.396.000 |
| 281 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Maluku Utara | Maluku Utara | 1 | Dokumen | 16.500.000 |
| 282 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | 1 | Dokumen | 11.360.000 |
| 283 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | 1 | Dokumen | 11.510.000 |
| 284 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua Barat | Papua Barat | 1 | Dokumen | 26.460.000 |
| 285 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Papua | Papua | 1 | Dokumen | 27.260.000 |
| 286 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Riau | Riau | 1 | Dokumen | 10.440.000 |
| 287 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Barat | Sulawesi Barat | 1 | Dokumen | 10.274.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|---|---|---------------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 288 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan | 1 | Dokumen | 12.050.000 |
| 289 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah | 1 | Dokumen | 12.472.000 |
| 290 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara | Sulawesi Tenggara | 1 | Dokumen | 11.614.000 |
| 291 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sulawesi Utara | Sulawesi Utara | 1 | Dokumen | 10.640.000 |
| 292 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | 1 | Dokumen | 10.220.000 |
| 293 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Selatan | Sumatera Selatan | 1 | Dokumen | 17.190.000 |
| 294 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Utara | Sumatera Utara | 1 | Dokumen | 11.040.000 |
| 295 | Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam Rangka Pengadaan Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | 1 | Dokumen | 12.694.000 |
| 296 | Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori I | Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat | 1 | Satker | 126.611.000 |
| 297 | Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori II | Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara | 1 | Satker | 104.383.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|-----|---|--|--------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 298 | Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori III | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan | 1 | Satker | 99.709.000 |
| 299 | Inventarisasi Tanah Aset Pemerintah dan Hak Pengelolaan Tingkat Kabupaten/Kota Kategori IV | Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali | 1 | Satker | 97.489.000 |
| 300 | Usulan Persetujuan Pemberian/Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan tanah Pemerintah | Usulan Izin/Persetujuan | 1 | Usulan Izin/ Persetujuan | 1.881.000 |
| 301 | Usulan Penertiban Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Hak Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Pemerintah | Usulan Penertiban | 1 | Usulan Penertiban | 2.472.000 |
| 302 | Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori I | Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat | 1 | Kecamatan | 18.960.000 |
| 303 | Monitoring Perubahan Penggunaan Tanah Kategori II | Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara | 1 | Kecamatan | 17.500.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|--|---------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 304 | Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori I | Wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara | 1 | Satuan Pekerjaan | 50.500.000 |
| 305 | Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori II | Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara | 1 | Satuan Pekerjaan | 39.200.000 |
| 306 | Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori III | Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera utara, Sumatera barat, Riau, Kepulauan Riau Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung | 1 | Satuan Pekerjaan | 36.650.000 |
| 307 | Inventarisasi Tanah Negara Bekas Hak/Bekas Kawasan/Tanah Kritis Kategori IV | Wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali | 1 | Satuan Pekerjaan | 41.250.000 |
| 308 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1 - 250 Ha) | Luasan 1 - 250 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 1.335.000 |
| 309 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (250 - 500 Ha) | Luasan 250 - 500 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 2.135.000 |
| 310 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (500 - 1000 Ha) | Luasan 500 -1000 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 3.795.000 |
| 311 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (1000 - 2500 Ha) | Luasan 1000 - 2500 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 7.825.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|------------------------------------|---------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 312 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (2500 - 5000 Ha) | Luasan 2500 - 5000 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 19.900.000 |
| 313 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (5000 - 7500 Ha) | Luasan 5000 - 7500 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 24.775.000 |
| 314 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (7500 - 10000 Ha) | Luasan 7500 - 10000 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 32.775.000 |
| 315 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (10000 - 15000 Ha) | Luasan 10000 - 15000 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 40.850.000 |
| 316 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Lokasi (> 15000 Ha) | Luasan > 15000 Ha | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 40.850.000 |
| 317 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (1 - 5000 m) | Luasan < 5000 M ² | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 240.000 |
| 318 | Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (5000 - 10000 m) | Luasan 5000 - 10000 M ² | 1 | Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan | 280.000 |
| 319 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | DKI Jakarta | 1 | Provinsi | 1.546.750.000 |
| 320 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Jawa Barat | 1 | Provinsi | 2.532.383.000 |
| 321 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Jawa Tengah | 1 | Provinsi | 2.830.533.000 |
| 322 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | D.I. Yogyakarta | 1 | Provinsi | 1.488.502.000 |
| 323 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Jawa Timur | 1 | Provinsi | 3.044.748.000 |
| 324 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Aceh | 1 | Provinsi | 2.238.553.000 |
| 325 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sumatera Utara | 1 | Provinsi | 2.315.989.000 |
| 326 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sumatera Barat | 1 | Provinsi | 1.876.433.000 |
| 327 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Riau | 1 | Provinsi | 1.773.012.000 |
| 328 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Jambi | 1 | Provinsi | 1.662.149.000 |
| 329 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sumatera Selatan | 1 | Provinsi | 1.812.390.000 |
| 330 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Lampung | 1 | Provinsi | 1.802.406.000 |
| 331 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Kalimantan Barat | 1 | Provinsi | 1.919.537.000 |

| No. | Output/Suboutput/ Pekerjaan | Wilayah/Zona/ Kategori | Volume | | Total Biaya |
|------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 332 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Kalimantan Tengah | 1 | Provinsi | 2.086.087.000 |
| 333 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Kalimantan Selatan | 1 | Provinsi | 1.962.709.000 |
| 334 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Kalimantan Timur | 1 | Provinsi | 2.341.872.000 |
| 335 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sulawesi Utara | 1 | Provinsi | 1.978.442.000 |
| 336 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sulawesi Tengah | 1 | Provinsi | 1.804.278.000 |
| 337 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sulawesi Selatan | 1 | Provinsi | 2.364.432.000 |
| 338 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sulawesi Tenggara | 1 | Provinsi | 1.895.921.000 |
| 339 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Maluku | 1 | Provinsi | 1.912.683.000 |
| 340 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Bali | 1 | Provinsi | 1.772.050.000 |
| 341 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Nusa Tenggara Barat | 1 | Provinsi | 1.698.516.000 |
| 342 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Nusa Tenggara Timur | 1 | Provinsi | 1.880.368.000 |
| 343 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Papua | 1 | Provinsi | 3.210.652.000 |
| 344 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Bengkulu | 1 | Provinsi | 1.641.855.000 |
| 345 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Banten | 1 | Provinsi | 1.624.367.000 |
| 346 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Gorontalo | 1 | Provinsi | 1.585.779.000 |
| 347 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Bangka Belitung | 1 | Provinsi | 1.577.915.000 |
| 348 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Maluku Utara | 1 | Provinsi | 1.881.576.000 |
| 349 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Sulawesi Barat | 1 | Provinsi | 1.506.842.000 |
| 350 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Kep. Riau | 1 | Provinsi | 1.611.635.000 |
| 351 | Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah | Papua Barat | 1 | Provinsi | 2.122.492.000 |

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

SOFYAN A DJALIL